



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2018/PA Ek.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon I ; dan**

PEMOHON II, Umur 30 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon II ;**
Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang di bawah register perkara permohonan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA Ek. tanggal 01 Nopember 2018 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2009 telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA Ek.



sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Bungin yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di rumah bersama selama 8 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK KE-I PARA PEMOHON**, umur 7 tahun
 2. **ANAK KE-II PARA PEMOHON**, umur 4 tahun
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregster pencatatan di KUA
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2009 di Kabupaten Enrekang
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA Tk.



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan. Setelah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, Umur 45 tahun, agama Islam, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2009 di Kabupaten Enrekang.
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung Bungin bernama **IMAM KAMPUNG** dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**.
 - Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA Tk.



larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertujuan agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Enrekang.
2. **SAKSI II**, Umur 44 tahun, agama Islam, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II. Saksi juga sebagai tokoh masyarakat di Desa Bungin.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2009 di Kabupaten Enrekang.
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung Bungin saat itu bernama **IMAM KAMPUNG** dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**.
 - Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA Tk.



larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertujuan agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Enrekang.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada akhirnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang terurai pada berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2009 di Kabupaten Enrekang.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA Tk.



Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan dua orang saksi. Dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 172 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2009 di Kabupaten Enrekang. Ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** sebagai wali nikah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA Tk.



disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah masing-masing berstatus jejaka dan perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi terhadap data-data di persidangan maka ditemukan fakta-fakta (fakta hukum) di sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2009 di Kabupaten Enrekang. Ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** sebagai wali nikah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Raman dan **SAKSI NIKAH II**
2. Ketika menikah, pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan. Di samping itu, sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atau selama lebih 8 tahun tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA Tk.



3. Setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama lebih 8 tahun perkawinannya, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2009 di Dusun Palembang, Desa Bungin, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang Ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** sebagai wali nikah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA Tk.



Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat permohonan itsbat nikah a quo beralasan dan berdasar hukum maka patut dikabulkan untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertujuan agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Enrekang kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang.

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2009 di Kabupaten Enrekang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA Tk.



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Enrekang yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis pada hari **Kamis**, tanggal **23 Nopember 2018 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal ... **Shafar 1439 Hijriah** oleh **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** sebagai ketua majelis, **Laila Syahidan, S.Ag**, dan **Yusuf Bahrudin, S.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Muhyiddin, S.HI** sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dr. Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Laila Syahidan, S.Ag.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S.HI

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 500.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : **Rp 591.000,00**

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA Tk.